# KLIPPING BERITA MEDIA MASSA

**Jumat, 14 Juni 2019**

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

# KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

# DAFTAR ISI


| No | Media | Tanggal | News Title | Resume |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Republika (Hal. 2) | 14 Juni 2019 | Pemda Diminta Responsif | Ketersediaan air di waduk dan embung harus dipastikan mencukupi |
| **2** | Republika (Hal. 9) | 14 Juni 2019 | BPJT Ingin Rombak Rest Area | Untuk menghindari penumpukan kendaraan yang menyebabkan kemacetan |
| **3** | Republika (Hal. 10) | 14 Juni 2019 | Kecelakaan Selama Mudik Berkurang | Infrastruktur baru menjadi salah satu faktor keberhasilan arus mudik dan balik |
| **4** | Republika (Hal. 16) | 14 Juni 2019 | Sampah di Wadu Pluit | Debit air menurun yang diwarnai dengan banyaknya sampah mengambang |
| **5** | Kompas (Hal. 10) | 14 Juni 2019 | Potensi Plastik Daur Ulang Tinggi, tetapi Banyak Terbuang | Semua jenis plastic secara teknis bisa didaur ulang, secara ekonomi hanya beberapa plastic yang potensial didaur ulang |
| **6** | Kompas (Hal. 15) | 14 Juni 2019 | Berita Foto | Pertumbuhan perumahan di sekitar tol trans Jawa meningkat pesat |
| **7** | Kompas (Hal. 19) | 14 Juni 2019 | Mewdahi Ekosistem Menuju “Digital Hub” | Komunitas digital jauh lebih menjanjikan untuk kemudian mendorong okunpansi ruang-ruang kosong ini |
| **8** | Kompas (Hal. 21) | 14 Juni 2019 | DKI Rancang Pemilihan Sampah Mulai RW | Pemprov melihat kondisi sosial di masyarakat untuk menentukan strategi pengelolaan sampah yang diprioritaskan |
| **9** | Kompas (Hal. 21) | 14 Juni 2019 | Permukiman Mesti Diatur | Permukiman kumuh yang mengepung Waduk Pluit perlu diselesaikan. Sampah menumpuk yang terbawa aliran kali. |
| **10** | Bisnis Indonesia (Hal. 6) | 14 Juni 2019 | Pemerintah Perlu Memberikan Isentif Angkutan Umum | Guna meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum bus |
| **11** | Bisnis Indonesia (Hal. 7) | 14 Juni 2019 | EFektivitas Bebas Visa Dipertanyakan | Pemerintah melakukan evaluasi kebijakan bebas visa kunjungan ke Indonesia |
| **12** | Bisnis Indonesia (Hal. 19) | 14 Juni 2019 | Penempatan Lokasi Segera Ditetapkan | Untuk pembangunan Tol Bengkulu – Lubuk Linggau |
| **13** | Bisnis Indonesia (Hal. 19) | 14 Juni 2019 | Berita Foto | Suasana pembangunan TOD di stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Kamis (13/6) |
| **14** | Bisnis Indonesia (Hal. 19) | 14 Juni 2019 | HK & Berantas Bakal Bangun Bulango Ulu | Saat ini masuk lelang bendungan yang akan berlokasi di Gorontalo |
| **15** | Koran Tempo (Hal. 6) | 14 Juni 2019 | Bank Dunia Beri Pinjaman Utang Rp 707,69 Miliar | Untuk pembangunan jalan layang tol di kawasan Kali Malang, Jakarta Timur, |

| Judul | **Pemda Diminta Responsif** | Tanggal | 14 Juni 2019 |
|---|---|---|---|
| Media | Republika (Hal. 2) | | |
| Resume | Ketersediaan air di waduk dan embung harus dipastikan mencukupi | | |

# Pemda Diminta Responsif

● RR LAENY SULISTYAWATI, LILIS SRI HANDAYANI

## Ketersediaan air di waduk dan embung harus dipastikan mencukupi.

JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pemerintah daerah (pemda) responsif dalam menghadapi potensi kekeringan dan berbagai dampak lain yang diakibatkan masuknya musim kemarau tahun ini. Pemda dinilai sebagai pintu pertama dalam mengantisipasi terjadinya potensi bencana di daerah masing-masing.

Kepala Subdirektorat Pengembalian Hak Pengungsi Kedeputian Penanganan Darurat BNPB Budhi Erwanto mengatakan, pemda bisa memaksimalkan dukungan pemangku kepentingan yang ada sebagai antisipasi dini terhadap dampak kekeringan. Jika dinilai perlu membutuhkan bantuan, pemda juga bisa melakukan langkah-langkah lanjutan.

"Pertama, menetapkan status bencana (kekeringan), kemudian melaporkan dan mengajukan kebutuhan mendesak kepada BNPB," kata dia saat dihubungi *Republika*, Kamis (13/6)

Selain kekeringan, BNPB menyebut telah mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa daerah, khususnya daerah yang sudah dipetakan berpotensi tinggi terjadi karhutla, seperti Riau dan Sumatra Selatan. Salah satunya, menyiapkan bimbingan teknis (bintek) dengan pemangku kepentingan dan instansi terkait.

"Bintek ini antara daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan instansi terkait mulai 14 Juni 2019 (hari ini) dan serentak dilakukan. Harapannya, pemerintah provinsi dan daerah lebih siap lagi yang tetap didukung oleh BNPB," ujar dia.

Bencana kekeringan mengancam berbagai daerah seiring masuknya musim kemarau tahun ini. Krisis air bersih, potensi karhutla, hingga lahan pertanian yang terancam gagal panen pun mengintai.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan, Jawa Timur, mencatat, ratusan hektare sawah terdampak kekeringan pada awal musim kemarau 2019 dan terancam gagal panen. Total luas lahan di daerah tersebut yang ditanami padi mencapai 21 ribu hektare.

"Dari jumlah tersebut, terdapat ratusan hektare lahan yang mengalami kekeringan dan bahkan puso," ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan (DTPHP-KP) Magetan, Eddy Suseno.

Sesuai data, luas lahan padi yang puso mencapai 167 hektare, padi terdampak kekeringan ringan seluas 143 hektare, terdampak kekeringan sedang seluas 116 hektare, dan terdampak kekeringan berat seluas 151 hektare. Adapun daerah yang paling parah terdampak kekeringan terdapat di Kabupaten Magetan wilayah selatan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang diprediksi cukup besar di tahun ini. Diperkirakan, 360 desa mengalami kekeringan pada awal musim kemarau ini. Dari ratusan desa itu, ada 2.056.287 jiwa dan 545.851 kepala keluarga yang terdampak.

"Kami telah meningkatkan koordinasi dengan semua kantor PDAM untuk bersiap menggelontorkan bantuan air bersih bagi warga yang terdampak bencana kekeringan," kata Kepala BPBD Provinsi Jateng Sudaryanto.

Selain itu, suplai air dari sejumlah waduk dan embung di beberapa daerah juga penting diperhatikan. "Ketersediaan air di waduk dan embung harus dipastikan benar-benar mencukupi berbagai kebutuhan warga, baik itu untuk pertanian maupun kebutuhan hidup sehari-hari," ujar Sudaryanto.

Sejumlah petani di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terpaksa membuat tempat penampungan air dari terpal di tengah sawah karena minimnya sumber air akibat musim kemarau. Cara itu dilakukan untuk menyelamatkan tanaman palawija mereka dari ancaman kekeringan.

Terkait keluhan masyarakat ini, Bupati Indramayu, Supendi, meminta pengelola Bendung Rentang agar menambah debit air yang sudah ada untuk Kabupaten Indramayu. Hal itu untuk menyelamatkan tanaman padi yang saat ini mengalami kekeringan di sejumlah daerah di Kabupaten Indramayu.

Supendi mengatakan, ketersediaan air penting untuk menyelamatkan areal tanaman padi milik petani yang terancam kekeringan, terutama di Kecamatan Kandanghaur, Losarang, dan Gabuswetan. Ketiga kecamatan itu merupakan daerah terjauh dari saluran Cipelang sehingga air yang ada belum bisa sampai ke tiga kecamatan tersebut.

"Jika (debit air) tetap stabil, kita optimistis air bisa sampai hilir. *Pokoknya* air dari Bendung Rentang jangan sampai turun debitnya, bahkan jika bisa terus dinaikkan," ujar Supendi.

■ antara **ed:** mas alamil huda

| Judul | **BPJT Ingin Rombak Rest Area** | Tanggal | 14 Juni 2019 |
|---|---|---|---|
| Media | Republika (Hal. 9) | | |
| Resume | Untuk menghindari penumpukan kendaraan yang menyebabkan kemacetan | | |

# BPJT Ingin Rombak *Rest Area*

JAKARTA -- Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) menyambut baik rencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengevaluasi dan melakukan perubahan tata letak *rest area* di jalan tol Trans-Jawa.

Kepala BPJT, Danang Parikesit mengatakan, pihaknya mengusulkan agar desain *rest area* diubah secara menyeluruh. "Usulan kami (evaluasi) menyeluruh terhadap peraturan Kementerian PUPR tentang tempat istirahat (TI) dan tempat istirahat dan pelayanan (TIP) jalan tol," kata Danang saat dihubungi *Republika*, Kamis (13/6).

Ia menyampaikan, BPJT bahkan mendukung evaluasi desain *rest area*, baik dari segi tata letak maupun pemanfaatan lahan baru untuk perluasan. Sebab, berdasarkan evaluasi arus mudik dan balik tahun ini, *rest area* tidak hanya menjadi fungsi peristirahatan, tetapi juga memiliki banyak fungsi lain.

Khusus perbaikan *rest area* dengan menambah area luasan, Danang menyebut, tentunya bakal ada lahan yang memang telah dimiliki operator, ataupun harus melalui mekanisme pembebasan lahan.

Head of Department Corporate Communication Jasa Marga, Irra Soenargi mengatakan, pihaknya belum mendapat arahan terkait perubahan desain *rest area*.

Seperti diketahui, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, bakal mengevaluasi desain *rest area* di tol, baik di Pulau Jawa maupun Sumatra. Evaluasi desain tersebut karena *rest area* kerap menyebabkan macet, baik saat arus mudik maupun arus balik tahun ini.

"Kita evaluasi desain. Untuk parkir lebih disiapkan khusus, tidak menyebar di semua ruang *rest area*," kata Basuki.

Ia mengatakan, perubahan desain parkir tersebut diperlukan karena berdasarkan pelaksanaan arus balik dan mudik, area parkir dijadikan pemudik sebagai peristirahatan. Oleh sebab itu, pihaknya memandang perlu disediakan peristirahatan guna mengakomodasi para pemudik.

Selain itu, Basuki juga menyoroti *rest area* pada ruas jalan tol antarkota. Menurut dia, posisi *rest area* terlalu dekat dengan pinggir jalan sehingga kerap menimbulkan kemacetan.

Kementerian PUPR akan mengevaluasi *rest area* yang saat ini berada persis di pinggir jalan tol. "Akan lebih baik jika desainnya menjorok ke dalam, terutama untuk jalan tol antarkota yang masih memungkinkan ketersediaan lahannya," ujar Basuki.

■ dedy darmawan nasution **ed:** fuji pratiwi

| Judul | **Kecelakaan Selama Mudik Berkurang** | Tanggal | 14 Juni 2019 |
|---|---|---|---|
| Media | Republika (Hal. 10) | | |
| Resume | Infrastruktur baru menjadi salah satu faktor keberhasilan arus mudik dan balik | | |

# Kecelakaan Selama Mudik Berkurang

● ARIE LUKIHARDIANTI, ITA NINA WINARSIH

**Infrastruktur baru menjadi salah satu faktor keberhasilan arus mudik dan balik.**

SEMARANG — Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah mencatat jumlah kecelakaan lalu lintas selama pelaksanaan Operasi Ketupat Candi 2019 berkurang. Kasus kecelakaan turun dari 324 pada 2018 menjadi 256 kejadian pada tahun ini.

Meski begitu, jumlah korban meninggal dunia di Jateng akibat kecelakaan lalu lintas selama operasi tersebut meningkat. Jumlahnya naik dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas selama pelaksanaan Operasi Ketupat Candi 2019 mencapai 32 orang. Sementara, pada Operasi Ketupat Candi 2018 berjumlah 12 orang. Namun, korban meninggal selama penyelenggaraan arus mudik dan balik Lebaran tersebut bukan merupakan pemudik.

"Korban meninggal didominasi kejadian kecelakaan lalu lintas di luar jalur tol," kata Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Rudy Antariksa di Semarang, Kamis (13/6).

Para korban meninggal berasal dari arus lokal. Mayoritas merupakan pengendara motor.

Terkait arus balik Lebaran, Rudy menyebut arus kendaraan pemudik sudah mulai berkurang meski belum sepenuhnya kembali dari wilayah Jawa Tengah.

Dia mengatakan, masih ada sekitar 15 persen pemudik yang belum kembali dari mudik Lebaran. Rekayasa lalu lintas sudah dinormalkan. "Sudah tidak ada kebijakan satu arah ataupun lawan arus," ujarnya.

Dari Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai manajemen arus mudik dan balik Lebaran 2019 merupakan yang terbaik. Indikatornya, yaitu angka kecelakaan turun lebih dari 60 persen dan jumlah korban turun hingga sekitar 30 persen.

Menurut Emil, sapaan akrabnya, angka penurunan tersebut menjadi tanda keberhasilan Polri dan TNI yang didukung masyarakat dalam Operasi Ketupat Lodaya 2019. Dia lantas berterima kasih kepada pihak-pihak tersebut yang telah bekerja keras menjaga keamanan dan ketertiban selama Lebaran tahun ini.

"Kita objektif ya, tahun ini Operasi Ketupat sangat lancar," ujarnya setelah menghadiri Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Lodaya 2019 dan Kesiapan Pengamanan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mapolda Jawa Barat.

Emil mengatakan, dari hasil pemonitorannya ke berbagai wilayah, Jabar termasuk salah satu daerah yang menyelenggarakan kegiatan mudik-balik terbaik. Dia berharap prestasi tersebut terus dipertahankan. Terlebih, masih berlangsungnya berbagai proyek pembangunan infrastruktur baru.

"Seperti Pak Jusuf Kalla (Wakil Presiden RI) sampaikan, keberhasilan mudik tahun ini ada aspek faktor infrastruktur baru yang dipergunakan, selain manajemen yang lain-lain, termasuk pengamanan oleh kepolisian, TNI, dan masyarakat," kata Emil.

Di wilayah hukum Polres Purwakarta, tidak ada kasus kecelakaan (*zero accident*) selama arus mudik dan balik Lebaran 2019. Kasus kecelakaan menurun 100 persen dibandingkan periode mudik 2018. Tahun lalu, ada satu kejadian kasus kecelakaan dengan korban jiwa meninggal dunia satu orang.

Meski begitu, secara umum ada dua kasus kecelakaan terjadi di Purwakarta, tapi tidak melibatkan pemudik. Kecelakaan tersebut menyebabkan dua orang meninggal dunia.

"Dua orang yang meninggal dunia itu bukan pemudik serta kecelakaannya bukan di jalur mudik," ujar Kapolres Purwakarta AKBP Matrius kepada *Republika*.

Berdasarkan catatan Satlantas Purwakarta, selama arus mudik dan balik Lebaran 2018 terjadi satu kasus kecelakaan di jalur mudik. Dari kasus tersebut, satu orang meninggal dunia dan tiga orang lainnya luka ringan.

"Alhamdulillah, mudik dan balik Lebaran tahun ini lancar, aman dan *zero accident*," ujar Matrius.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengapresiasi jajaran kepolisian, TNI, dan seluruh elemen yang turut membantu kelancaran arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Anne menilai pelaksanaan mudik dan balik Lebaran tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

"Terima kasih kepada kepolisian, TNI, serta semua pihak yang turut mengamankan dan menjaga kelancaran arus mudik dan balik Lebaran," ujar Anne.

Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono mengatakan, TNI dan Polri bertekad terus menjaga keamanan di wilayah Jawa Barat.

"Saya dengan Pak Kapolda menjaga Jawa Barat karena kalau Jawa Barat aman pasti pembangunan akan lancar. Kami akan mendukung Pak Gubernur *all out*," kata dia.

Selain itu, kata dia, pihak TNI bersama kepolisian juga berkomitmen akan terus menjaga soliditasnya. Menurut Tri soliditas TNI dan Polri tersebut bisa terlihat di lapangan.

"Kami selalu bergandengan tangan demi mewujudkan Jawa Barat yang aman, Jabar yang juara," kata Tri.

■ antara **ed:** qommarria rostanti

| Judul | **Sampah di Wadu Pluit** | Tanggal | 14 Juni 2019 |
|---|---|---|---|
| Media | Republika (Hal. 16) | | |
| Resume | Debit air menurun yang diwarnai dengan banyaknya sampah mengambang | | |

# *Sampah di Waduk Pluit*

Di dekat taman Waduk Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, tercium bau tidak sedap. Di dekat pintu air waduk, terdapat banyak sampah yang mengambang. Debit air pun dangkal dan berwarna hitam. Sampah plastik menghiasi tanah yang diturap, yang terlihat turun ke bawah air.

Saat *Republika* berkunjung pada siang hari, banyak warga yang memancing di Waduk Pluit. Waduk yang dihiasi sampah ini tidak membuat warga sepi untuk mengunjungi waduk yang mengalami pendangkalan tersebut. Bahkan, ada yang berekreasi bersama keluarga serta berpacaran.

Di bagian salah satu waduk timbul lumpur ke atas, sehingga membentuk pulau. Dua mesin ekskavator sedang mengeruk lumpur agar lumpur tidak timbul ke atas dasar waduk.

Salah satu petugas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI di Waduk Pluit, Rudi, mengatakan, jika memasuki musim panas memang debit air menurun. Sedangkan, jika musim hujan debit air tinggi mencapai sekitar dua meter sampai ke bagian dinding turap. Dia mengakui, sampah plastik selalu menghiasi Waduk Pluit.

"Setiap hari banyak sampah plastik, sampai mengambang sampahnya. Ya, turap yang masih dasar tanah juga sampah plastik menempel di situ," ucapnya saat ditemui di dekat turap, kemarin.

Rudi mengaku, baru dua bulan bekerja di waduk ini mengaku, bekerja sendiri dari pukul 08.00 WIB sampai 15.00 WIB. Dia harus bertugas setiap hari membersihkan sampah untuk melanjutkan tugas temannya yang masih cuti dan pulang kampung.

"Memang bau ditambah airnya hitam dan banyak karung isinya sampah. Nanti sampah-sampah ini ditaruh di dekat pintu air. Habis itu dibawa ke samping Polsek Penjaringan, dan dibuang ke Bantargebang," ujar Rudi.

Dia menambahkan, Waduk Pluit memang banyak dipenuhi endapan lumpur sehingga sampah pun mengambang ke atas dasar laut. Di sekitar waduk pun banyak permukiman warga. Jika musim hujan Waduk Pluit tidak di pompa maka air akan keluar dari permukaan sehingga menyebabkan banjir di area sekitar.

Salah satu warga Muara Angke, Lukman, mengatakan, kondisi Waduk Pluit terabaikan sejak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) tidak menjabat lagi sebagai gubernur DKI Jakarta.

"Dulu *kan* ini permukiman padat terus dipindahkan ke Rusun Waduk Pluit. Baru dijadikan Taman Waduk Pluit. Tetapi, sekarang tidak dirawat," kata Lukman.

■ haura hafizhah **ed:** erik purnama putra

| Judul | **Potensi Plastik Daur Ulang Tinggi, tetapi Banyak Terbuang** | Tanggal | 14 Juni 2019 |
|---|---|---|---|
| Media | Kompas (Hal. 10) | | |
| Resume | Semua jenis plastic secara teknis bisa didaur ulang, secara ekonomi hanya beberapa plastic yang potensial didaur ulang | | |

PENGELOLAAN SAMPAH

# Potensi Plastik Daur Ulang Tinggi, tetapi Banyak Terbuang

**JAKARTA, KOMPAS** — Potensi plastik daur ulang Indonesia dari sampah yang dihasilkan sangat tinggi. Namun, pengelolaan sampah yang belum tertata dan menjangkau para penghasil sampah menjadikan plastik yang masih memiliki nilai tinggi karena bisa didaur ulang tak termanfaatkan dan menjadi masalah lingkungan, bahkan Indonesia mengimpor *scrap* plastik bekas.

Setiap pihak, baik pemerintah, produsen kemasan, maupun konsumen, memiliki tanggung jawab untuk memastikan sampah dikelola baik. Itu bisa terjadi apabila sistem pengelolaan sampah berjalan dan penegakan hukum konsisten.

Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung, Enri Damanhuri, Kamis (13/6/2019), di Jakarta, mengatakan, hanya 20 persen sampah plastik di Indonesia yang didaur ulang. "Sebagian besar ke sana-kemari dan menjadi permasalahan lingkungan," katanya.

Ia menyebutkan, hampir semua jenis plastik secara teknis bisa didaur ulang. Namun secara perhitungan ekonomi, hanya beberapa jenis plastik yang potensial didaur ulang. Plastik yang layak secara ekonomis ter-

***Hampir semua jenis plastik secara teknis bisa didaur ulang. Namun secara perhitungan ekonomi, hanya beberapa jenis plastik yang potensial didaur ulang.***

sebut antara lain jenis PET, PE, PP, HDPE, dan PVC. Plastik lain, seperti kantong keresek, lembaran (LDPE), saset, *styrofoam* (PS), dan wadah makan sekali pakai, memiliki nilai ekonomi rendah dan sulit dijual.

"Hampir 60 persen plastik tak laku. Ada diskriminasi plastik dalam pengumpulan," katanya dalam bincang bersama #BeraniMengubah yang diselenggarakan PT Coca-Cola Indonesia.

Persentase ini semakin bertambah ketika pemulung atau industri daur ulang memproses plastik-plastik itu. Enri mencontohkan, botol plastik kemasan air minum ketika diproses daur ulang akan dibuang bagian label dan "leher". Bagian yang dibuang mencapai 25 persen yang kembali menjadi sampah.

Triyono Prijosoesilo, Public Affairs and Communication Director PT Coca-Cola Indonesia, mengatakan, secara global Coca-Cola menargetkan pada 2025 seluruh kemasan produknya bisa didaur ulang. Selain itu, pada 2030 sejumlah 50 persen kemasan produk menggunakan bahan daur ulang. Seluruh kemasan produk yang terjual bisa dikumpulkan kembali.

Gunawan Mangunsukarjo, Region Technical Director PT Coca-Cola Indonesia, menambahkan, bobot plastik kemasan botol air minum Ades dikurangi dari 17 gram menjadi 10,5 gram untuk mengurangi pemakaian plastik. (ICH)

| Judul | **Berita Foto** | Tanggal | 14 Juni 2019 |
|---|---|---|---|
| Media | Kompas (Hal. 15) | | |
| Resume | Pertumbuhan perumahan di sekitar tol trans Jawa meningkat pesat | | |

# Pertumbuhan Perumahan di Sekitar Tol Trans-Jawa

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

**Sejumlah kompleks** perumahan mulai didirikan di dekat Gerbang Tol Boyolali, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (13/6/2019). Kemudahan akses ke Tol Trans-Jawa menjadi salah satu faktor kuat bagi para pengembang perumahan menarik minat calon konsumen. Bermunculannya sejumlah tempat industri di sekitar Tol Trans-Jawa juga mendorong peningkatan kebutuhan tempat hunian bagi para pekerja.

| Judul | **Mewadahi Ekosistem Menuju "Digital Hub"** | Tanggal | 14 Juni 2019 |
|---|---|---|---|
| Media | Kompas (Hal. 19) | | |
| Resume | Komunitas digital jauh lebih menjanjikan untuk kemudian mendorong okunpansi ruang-ruang kosong ini | | |

# Mewadahi Ekosistem Menuju "Digital Hub"

Tak sekadar membangun gedung bertingkat. Selesai membangun lengkap dengan berbagai fasilitasnya, lalu lelah menunggu para penyewa datang menempati ruang-ruang kosong. Mewadahi terlebih dahulu komunitas berbasis digital jauh lebih menjanjikan untuk kemudian mendorong okupansi ruang-ruang kosong itu.

**Stefanus Osa**

KOMPAS/STEFANUS OSA TRIYATNA

**Tak sekadar** membangun gedung, Sinarmas Land yang masih memiliki lahan sangat luas di daerah Serpong, Banten, juga bakal menghadirkan *digital hub* untuk menjawab kebutuhan generasi milenial yang sangat tersenpil mengembangkan berbagai program digital.

Melangkah dari nol, membangun komunitas ekosistem digital tidaklah mudah. Namun, inilah pilihan tak terabaikan di era serba digital.

Tiga tahun silam, Presiden Joko Widodo berkunjung ke kantor pusat Facebook di Silicon Valley, California, Amerika Serikat. Sedikit mengutip pandangan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, kembali ini disebut-sebut menjadi ikon dan jantung revolusi teknologi informasi di muka bumi ini sejak akhir abad silam. Berbagai produk dan layanan telah dipikirkan, ditemukan, direkayasa, didesain, diproduksi, dikembangkan, disempurnakan, dan kemudian disebarluaskan di seluruh dunia.

"Silicon Valley menjadi simbol terpenting sejarah perkembangan Revolusi Industri 3.0, yang kemudian bergerak ke apa yang kini kita kenal sebagai Revolusi Industri Keempat," kata Yanuar (*Kompas*, 14 Mei 2018).

Hingga kini, "Silicon Valley" adalah impian besar bagi Indonesia. Jika diingat kembali, tahun 2016, Indonesia dikabarkan bakal memiliki kawasan serupa Silicon Valley. Isunya, ada gagasan membangun setara Silicon Valley di Gedebage (Bandung). Kemudian muncul beberapa isu bakal terbangun di kawasan Sentul (Bogor).

Kini, bicara titik kumpul digital (*digital hub*) yang dirancang Sinarmas Land di kawasan BSD, setidaknya ada rentetan fenomena yang saling berkaitan. Dimulai dari pertumbuhan usaha rintisan digital tahun 2016, kemudian Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo fokus mengampanyekan ekonomi digital dan bermunculan usaha rintisan.

Sinarmas Land sebagai pemain properti tak ingin tinggal diam. Jelas sekali usaha rintisan sebenarnya tidak punya dana besar dalam merintis usaha. Pembuat keputusan pembeli properti pun beralih dari tangan Gen X ke Gen Y.

Mereka sudah lulus sekolah, mencari pekerjaan sesuai kebutuhan. Misalnya, tempat kerja yang tersedia tempat bertemu, sekadar bisa duduk-duduk sambil minum kopi melahirkan inovasi-inovasi terbaru. Bisa tetap kerja di lokasi luar ruang, tetapi serba terkoneksi.

Sebagai pemain properti, tren perubahan menjadi tantangan tersendiri. Tidak bisa lagi sekadar membangun gedung yang akhirnya sepi. Hingga tahun 2030, populasi jumlah generasi milenial bakal mendominasi. Kemampuan belanja generasi ini bisa untuk investasi rumah, apartemen, ataupun tanah. Mereka bisa menciptakan perusahaan sendiri.

Sebelum sampai ke sana, Sinarmas Land merasa perlu memiliki tempat untuk menciptakan ekosistem digital di area CBD BSD City. Terdorong akan tren itu, lahan seluas 26 hektar dari total area CBD seluas 800 hektar bakal dijadikan titik kumpul digital yang kelak terkoneksi dengan *green office park*.

Titik kumpul digital sesungguhnya serupa kantor taman juga, tetapi lebih ingin melindungi keberadaan komunitas digital. Dari lahan 26 hektar, 65 persen akan dirancang menjadi bangunan, sedangkan sisanya 35 persen dirancang sebagai penghijauan dan jalan penghubung.

Model bisnisnya tidak sekadar dibangun dan disewakan, tetapi beberapa lahan akan dijual. Ada juga yang dibangun dan disewakan, tetapi ada 19 unit untuk bisnis digital (*co-working space*) atau SOHO (*small office home office*).

Adapun pelengkap penanjang yang kini sedang digarap antara lain jalur pedestrian dengan rute rumah lingkungan, ruang untuk menciptakan interaksi sosial, penunjang strategi yang dihasilkan dari energi terbarukan, dan konektivitas yang *smart*. Hal inilah tantangan terbesar yang harus dihadapi untuk benar-benar mewujudkan impian "Silicon Valley".

## Lebih menciptakan

CEO Sinarmas Group Michael Widjaja justru punya pandangan lain. Pengembang hebat sekalipun tentu bisa membangun gedung dan menyewakan. Sementara kalangan usaha rintisan belum tentu juga dapat menyewa kantor di kawasan strategis CBD. Karena itu, menciptakan ekosistem jauh lebih perlu diprioritaskan agar hidup di titik kumpul digital ini.

Irawan Harahap selaku Project Leader Digital Hub Sinarmas Land mengatakan, "*Digital hub* sebenarnya kantor taman yang ingin memproteksi komunitas digital. Beda sekali dengan *green office park* atau GOP didesain 35 persen perkantoran dan 65 persennya penghijauan plus jalan."

Kelak bangunan *digital hub* mencapai 65 persen, sedangkan 35 persennya penghijauan dan konektivitas. Kavling *digital hub* tetap dijual dengan luasan 3.000 meter persegi hingga lebih dari 2 hektar, kemudian dibangun perkantoran yang disewakan, tetapi juga ada lot bisnis dengan sistem SOHO strata *title* setinggi empat lantai luasan 600 meter persegi.

"*Start up* tentu tidak semua punya uang untuk sewa. Karena itu, kami lebih dahulu menciptakan ekosistem digital agar kelak bisa hidup di *digital hub*," kata Irawan.

Sinarmas Land telah menggandeng arsitek NBBJ Amerika yang sudah menggarap Amazon Headquarters di Seattle, Bill and Melinda Gates Foundation di Amerika, dan Alibaba Campus di China. Arsitek ini dipandang sudah memahami kebutuhan generasi milenial, mulai dari lanskap, konektivitas, hingga area aktivitas berdasarkan zona.

Obsesi besarnya adalah mulai menciptakan BSD sebagai pusat akademi digital. Langkah awalnya adalah memperbanyak akademi yang ditujukan bagi pemilik talenta-talenta masa depan. Talenta futuristik yang dibutuhkan seluruh dunia. Misalnya, IOS Developer Apple yang baru saja meluluskan 300 orang. Atau Purwadhika yang fokus mengajarkan *coding* untuk menghasilkan usaha rintisan mandiri, seperti Binar Academy dan Geekofarm.

Komunitas digital lain di antaranya Creativeness yang fokus pada sekolah pelatihan animasi yang benar-benar tersertifikasi standar internasional. Edukasi menjadi dasar tempat titik kumpul digital agar melahirkan [illegible] tidak digarap terfokus oleh perguruan tinggi di Indonesia.

"Keterampilan yang dihasilkan sangat berbeda dengan yang dilahirkan oleh universitas-universitas. Lulusannya spesifik dibutuhkan oleh target pasar. Ketika lulus akademi ini, orang-orang bertalenta itu memiliki dua pilihan, yakni membuat *start up* sendiri dengan memanfaatkan *working space* atau bekerja di perusahaan di kawasan BSD juga," tutur Irawan.

Benyamin Davnie, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, dalam diskusi bertajuk "Being Smart with Smart City" di Serpong, Rabu (10/4/2019), memandang, kemajuan era digital tetap memerlukan penataan kota yang baik. Ketersediaan transportasi publik menuju kawasan berbasis digital juga akan menjadi salah satu kriteria sebuah kota benar-benar bisa disebut *smart city*. Bukan melulu kecanggihan teknologi gawai.

Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata yang melihat perkembangan BSD sebagai kota cerdas, terlebih pengembangan digital yang makin diberikan wadah oleh pengembang, akhirnya memberanikan diri untuk menjalin kerja sama dengan Sinarmas Land.

"Kerja yang tidak mudah mewujudkan kota yang cerdas, seperti kelak dibangunnya *digital hub* ini. Tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga menunjukkan kemampuan bangsa Indonesia," ujar Ridzki.

Kelak, seiring terbangunnya *digital hub*, Grab pun siap berkomitmen membangun teknologi yang dibutuhkan masyarakat. Grab sudah membidik *digital hub* itu sebagai salah satu laboratorium teknologi permesinan Grab di Indonesia. "Banyak kreativitas yang bisa dilahirkan untuk Indonesia lebih baik," katanya.

| Judul | **DKI Rancang Pemilihan Sampah Mulai RW** | Tanggal | 14 Juni 2019 |
|---|---|---|---|
| Media | Kompas (Hal. 21) | | |
| Resume | Pemprov melihat kondisi sosial di masyarakat untuk menentukan strategi pengelolaan sampah yang diprioritaskan | | |

PERSAMPAHAN

# DKI Rancang Pemilahan Sampah Mulai RW

**JAKARTA, KOMPAS** — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan warga akan membentuk lembaga pengelola sampah atau LPS di tingkat rukun warga pada tahun ini. LPS bakal memastikan pemilahan sampah dilakukan di permukiman.

Berdasarkan Pasal 127 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, setiap rumah tangga yang lalai atau dengan sengaja tidak memilah sampah wajib diberi sanksi administratif sesuai keputusan musyawarah pengurus RW. Namun, ketentuan itu belum pernah dilaksanakan hingga enam tahun berselang.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Andono Warih beralasan, pemprov melihat kondisi sosial di masyarakat untuk menentukan strategi pengelolaan sampah yang diprioritaskan. Namun, ia memastikan pemaksaan untuk memilah sampah akan diterapkan.

"Kami akan lakukan itu semua, termasuk pembatasan pengambilan sampah," ucapnya seusai berbicara dalam peluncuran Jakarta Less Waste Initiative (JLWI) for Building and Restaurant, Kamis (13/6/2019), di Jakarta Selatan.

Andono menjadi pembicara bersama Kepala Seksi Bina Peritel Direktorat Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Supriyanto dan Managing Director Waste4Change Bijaksana Junerosano.

Kepala Seksi Pengelolaan Sampah DLH DKI Rahmawati menambahkan, tidak berjalannya penerapan sanksi bagi pemilik rumah yang tidak memilah sampah antara lain karena ketua rukun tetangga (RT) dan RW merasa warga sudah melaksanakan kewajiban mereka dengan membayar iuran sampah. Uang yang terkumpul disalurkan ke petugas pengangkut sampah di lingkungan mereka, yang belum mendapatkan pembinaan terkait pengelolaan sampah.

Karena itu, LPS dibentuk di RW tahun ini. "Kami sudah beberapa kali FGD (diskusi kelompok terarah) di kelurahan, mungkin selanjutnya di tingkat RW," ujar Rahmawati.

Menurut rencana, LPS berupa organisasi legal yang terdaftar di DLH DKI. Dengan demikian, pemberian honor kepada anggota LPS dimungkinkan. Namun, menurut Rahmawati, diskusi belum membicarakan sampai penentuan honor. Saat ini, diskusi masih membahas teknis organisasinya.

Pembentukan LPS di tingkat RW juga merupakan amanat Perda Nomor 3 Tahun 2013 pada Pasal 70. Berdasarkan Pasal 71, tugas LPS lingkup RW adalah memfasilitasi tersedianya wadah sampah di masing-masing rumah tangga dan sarana pengumpulan sampah, menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga, serta mengusulkan kebutuhan terkait pengelolaan sampah yang perlu diadakan kepada lurah melalui pengurus RW.

***Pemprov melihat kondisi sosial di masyarakat untuk menentukan strategi pengelolaan sampah yang diprioritaskan.***

Pemilahan sampah di permukiman krusial mengingat data kajian Dinas Kebersihan DKI tahun 2011 menunjukkan, 60,5 persen sampah DKI bersumber dari permukiman.

Dari data penimbangan di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantargebang di Kota Bekasi, total sampah Jakarta 7.500 ton per hari. Sampah DKI yang menumpuk dua hari sudah setara Candi Borobudur.

Rahmawati menuturkan, LPS akan menyalurkan sampah dari RW ke tempat penampungan sampah (TPS). Namun, dengan tertib pemilahan sampah, LPS hanya menyalurkan sampah yang benar-benar tidak bisa digunakan kembali atau diolah di RW. Dengan demikian, sampah anorganik yang bisa digunakan kembali atau didaur ulang serta sampah organik yang bisa dijadikan kompos, tidak diangkut. Volume sampah DKI ke TPST Bantargebang pun bakal berkurang.

Andono mengatakan, solusi mengurangi volume sampah yang masuk TPS dan TPST tidak bisa tunggal. Solusi lain juga harus dikerjakan. Karena itu, pemprov mendorong pengelola gedung komersial dan restoran untuk mengurangi sampah lewat kompetisi JLWI.

Sampah dari kawasan komersial dan dunia usaha menyumbang 28,7 persen total volume sampah DKI, tertinggi kedua setelah sampah dari permukiman. Namun, belum ada program yang spesifik merangkul pelaku usaha.

Program JLWI berlangsung pada Juni-November 2019. Selama itu, peserta dari restoran dan pengelola gedung mendapat pelatihan persampahan, konsultasi, serta monitoring dan evaluasi. Peserta dengan praktik terbaik akan menerima penghargaan Gubernur DKI.

Junerosano menuturkan, setiap orang harus bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan. "Kalau kamu menghasilkan sampah, kamu harus bayar," ujarnya. (JOG)

| Judul | **Permukiman Mesti Diatur** | Tanggal | 14 Juni 2019 |
|---|---|---|---|
| Media | Kompas (Hal. 21) | | |
| Resume | Permukiman kumuh yang mengepung Waduk Pluit perlu diselesaikan. Sampah menumpuk yang terbawa aliran kali. | | |

# Permukiman Mesti Diatur

Persoalan permukiman kumuh yang mengepung Waduk Pluit perlu diselesaikan. Apabila tidak, persoalan sampah yang terbawa aliran kali di sepanjang permukiman tersebut tidak akan berakhir.

**JAKARTA, KOMPAS** — Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih, di Jakarta, Kamis (13/6/2019), mengatakan, pembersihan sampah di Waduk Pluit harus diikuti kerja kolektif antarsatuan kerja perangkat daerah di pemerintah kota, bahkan di tingkat provinsi. Sebab, di waduk itu, permasalahan yang timbul bukan hanya sampah, melainkan juga permukiman kumuh.

"Jadi, memang harus ada penyelesaian yang mendasar dan solusi yang lebih serius untuk menanganinya secara komprehensif. Permukiman ditata, pembersihan kali dari sampah juga harus terus dilakukan," tutur Andono.

Dalam pemberitaan *Kompas*, Rabu (12/6), sedimentasi lumpur bercampur sampah mengotori Waduk Pluit, Jakarta Utara. Timbunan sampah berasal dari dua aliran kali, salah satunya Kali Gendong yang melewati permukiman kumuh dekat waduk.

Andono menegaskan bahwa Waduk Pluit merupakan instalasi perairan yang sangat strategis. Oleh karena itu, menurut dia, jangan sampai fungsi waduk bisa terganggu karena adanya sampah.

Pantauan *Kompas*, pada pukul 16.00 kemarin, Kali Gendong sepanjang sekitar 1 kilometer itu dipenuhi sampah. Sebagian badan kali nyaris tidak terlihat lantaran tertutup aneka sampah.

Sebagian rumah warga berbentuk rumah panggung juga dibangun tepat di atas aliran Kali Gendong. Warga sekitar juga membuang sampah dan mengalirkan limbah rumah tangga ke aliran kali yang bermuara di Waduk Pluit.

Karno (45), warga RT 016 RW 017 Kelurahan Penjaringan, yang bermukim tepat di tepian Kali Gendong, mengatakan, sampah di Kali Gendong sangat mengganggu karena menimbulkan bau busuk hingga ke dalam rumah.

Dia berharap ada perhatian pemerintah untuk segera mengangkut sampah itu.

"Apalagi, kalau musim hujan, banjir surutnya cukup lama karena banyak tertahan sampah. Saat itu, baunya enggak tahan," kata Karno.

### Tanpa penggusuran

Meski demikian, warga berharap pembersihan sampah di Kali Gendong dilakukan tanpa menggusur rumah warga di bantaran kali.

Karno mengaku tinggal puluhan tahun di situ dan rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahun.

Kepala Seksi Humas RW 017 Arifin Maka mengatakan, pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah untuk membersihkan sampah di kali itu. Mereka akan menggelar rapat pengurus RW 017 untuk mendengar aspirasi masyarakat dan mencari solusi agar pembersihan Kali Gendong dapat berjalan.

"Ini mau enggak mau harus dibersihkan. Mau sampai kapan kali seperti ini. Minimal alirannya dikembalikan ke semula dan diperluas ke kiri sekitar 2 meter dan kanan 2 meter," tutur Arifin.

Lurah Penjaringan Depika Romadi, Rabu, mengatakan, kepemilikan lahan di Muara Baru beragam. Selain milik pemerintah daerah, juga ada lahan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Indonesia Port Corporation, dan perusahaan swasta.

Sebelumnya, Kepala Unit Pengelola Kegiatan Badan Air Jakarta Utara Lambas Sigalingging menuturkan, pembersihan sampah di Kali Gendong bisa dilakukan, tetapi akan merobohkan rumah warga di pinggir kali.

### Situ susut

Di Tangerang, luas sejumlah situ menyusut akibat okupasi lahan.

Dalam catatan *Kompas*, Tangerang Selatan seharusnya memiliki sembilan situ. Namun, kondisi situ sangat memprihatinkan karena banyak yang beralih fungsi.

Situ Pamulang di Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, berada di sekitar Pacuan Kuda Pamulang. Situ ini memiliki luas sekitar 7,71 hektar dari awalnya seluas 31 hektar. Penyusutan terjadi karena penimbunan oleh masyarakat di bantaran situ.

Situ Pondok Jagung atau disebut Situ Rawa Kutup, di Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, terdapat di sekitar kawasan Perumahan Alam Sutera, Perumahan Melati, dan Perumahan Graha Raya Bintaro.

Situ Parigi di Parigi Lama, Pondok Aren, mengalami pendangkalan akibat lumpur dan sampah. Sebagian air dari situ seluas 56.092,875 meter persegi itu berbuih tebal.

Pemda setempat mengusulkan ke pemerintah pusat untuk penataan dan pengerukan situ. Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan daya tampung situ.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan Aries Kurniawan mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Provinsi Banten terkait penataan situ berupa pemeliharaan, serta pembersihan situ dari rumput, gulma, dan sampah.

(PIN/BOW/VAN)

## Permasalahan Pengelolaan Situ-Waduk

1. Tidak jelas batas lahan situ
2. Tidak jelas status kepemilikan lahan situ
3. Belum ada aturan untuk pengelolaan situ
4. Banyaknya alih fungsi lahan situ
5. Tingginya pendangkalan akibat sedimentasi
6. Terjadinya pencemaran akibat limbah
7. Banyaknya pemanfaatan situ tanpa izin

***Situ di Provinsi Banten***

**Luas Situ (Ha)**

| Wilayah | Awal | Hilang | Saat Ini |
|---|---|---|---|
| Kab. Tangerang | 951,33 | 202,46 | 748,87 |
| Kota Tangerang | 270,3 | 116,8 | 153,5 |
| Kota Tangsel | 149,3 | 24,61 | 124,69 |

**Jumlah Situ**

| Wilayah | Awal | Hilang | Saat Ini |
|---|---|---|---|
| Kab. Tangerang | 29 | 5 | 24 |
| Kota Tangerang | 8 | 3 | 5 |
| Kota Tangsel | 10 | 0 | 10 |

Sumber: Paparan "Pengelolaan Situ di Jabodetabek dalam Perspektif Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum, Sub-bidang Sumber Daya Air (Kementerian Dalam Negeri, 2017)", dan pemberitaan Kompas, diolah Litbang Kompas/PUT/XNA/YDS

| Judul | **Pemerintah Perlu Memberikan Isentif Angkutan Umum** | Tanggal | 14 Juni 2019 |
|---|---|---|---|
| Media | Bisnis Indonesia (Hal. 6) | | |
| Resume | Guna meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum bus | | |

TOL SOLO-YOGYAKARTA

# Pemerintah Perlu Memberikan Insentif Angkutan Umum

Bisnis, SEMARANG — Pemerintah dinilai perlu memberikan insentif untuk angkutan umum di daerah guna meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum bus seiring dengan rencana pembangunan tol Solo—Yogyakarta.

Akademisi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Djoko Setijowarno mengungkapkan saat ini angkutan umum bus antarkota antarprovinsi (AKAP) dari Jawa Tengah atau Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mulai bergairah dengan terbangunnya tol Trans-Jawa.

Saat ini, paparnya, sudah ada bus AKAP Trans-Jawa yang berangkat pagi dari Jawa Tengah menuju Jakarta, begitu juga sebaliknya.

"[Hal yang diperlukan untuk meningkatkan jumlah PO yang mau membuka jalur ketika Solo—Yogyakarta terbangun adalah] insentif buat angkutan umum di daerah," kata Djoko kepada *Bisnis*, Kamis (13/6).

Dia menjelaskan, insentif yang dapat diberikan pemerintah untuk mengembangkan angkutan umum daerah dapat berupa insentif operasional sehingga masyarakat berminat untuk menggunakan angkutan umum.

Saat ini, tambahnya, belum ada insentif yang diberikan pemerintah untuk angkutan umum daerah. Insentif untuk angkutan umum daerah baru akan ada pada 2020 untuk wilayah Solo dan sekitarnya.

Meskipun tol Solo—Yogyakarta dapat membuat penggunaan angkutan umum bergairah kembali, dia menambahkan, sebenarnya pembangunan jalan tol tersebut akan lebih memanjakan para pengguna kendaraan pribadi.

Pembangunan jalan tol Solo—Yogyakarta, dia menilai, dapat menimbulkan pro dan kontra di beberapa bagian mengingat akan melalui lahan produktif.

Sebelumnya, pemerintah berencana membuat proyek jalan tol Solo—Yogyakarta menjadi dua paket jalan sembari menyelesaikan trase yang masih dalam proses.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pihaknya akan memulai proyek pembangunan jalan tol Solo—Yogyakarta yang berada di Jawa Tengah terlebih dahulu sambil menyelesaikan desain trase di wilayah Yogyakarta.

Menurutnya, lelang pengerjaan proyek jalan tol Solo—Yogyakarta yang berada di bagian Jawa Tengah akan dilakukan dalam waktu dekat.

*(Yudi Supriyanto)*

| Judul | **EFektivitas Bebas Visa Dipertanyakan** | Tanggal | 14 Juni 2019 |
|---|---|---|---|
| Media | Bisnis Indonesia (Hal. 7) | | |
| Resume | Pemerintah melakukan evaluasi kebijakan bebas visa kunjungan ke Indonesia | | |

▸ STRATEGI MENGGAET WISMAN

# Efektivitas Bebas Visa Dipertanyakan

**Bisnis, JAKARTA — Evaluasi terhadap kebijakan bebas visa kunjungan ke Indonesia dinilai mendesak, lantaran efektivitasnya dalam menggaet kunjungan wisatawan mancanegara ditengarai tak cukup maksimal.**

Yanita Petriella
yanita.petriella@bisnis.com

Sekadar catatan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No.21/2016 tentang Bebas Visa Kunjungan di mana terdapat 169 negara yang mendapatkan akses bebas kunjungan ke Indonesia. Pada 2011, hanya ada total 15 negara yang diberikan bebas visa. Lalu, pada 2015, terdapat 45 negara bebas visa kunjungan tahap pertama dan 90 negara bebas visa kunjungan tahap kedua. Pada 2016, terdapat total 169 negara yang diberikan bebas visa kunjungan.

Sebaliknya, Indonesia hanya diberikan bebas visa maupun *visa on arrival* di 70 negara. Paspor Republik Indonesia menempati urutan ke-71 sebagai paspor 'terkuat' di dunia, menurut Henley Passport Index 2019. Menurut lembaga tersebut, kekuatan paspor suatu negara terindikasi dari seberapa banyak akses bebas visa yang didapatkan negara tersebut.

Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Travel Agent Indonesia Rudiana Jones mengatakan, bebas visa kunjungan yang diberikan pemerintah untuk turis asing tidak adil atau resiprokal bila dibandingkan dengan jumlah bebas visa yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau wisatawan nasional yang berpergian ke luar negeri.

"Tentu ini tidak adil ya. Mereka [turis asing] gampang ke Indonesia, tetapi kita susah ke luar negeri," ujarnya, Kamis (13/6).

Memang, sambungnya, kebijakan bebas visa yang diberikan kepada 169 negara membawa pengaruh pada kedatangan wisman ke Tanah Air. Namun, tak semua negara yang dibebaskan visa oleh Indonesia ini berkontribusi pada jumlah wisman yang datang ke Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisman pada 2015 atau sebelum adanya bebas visa kunjungan 169 negara ini sebanyak 10,41 juta kunjungan. Sejak diberlakukan bebas visa kunjungan, terdapat kenaikan kedatangan wisman secara berturut-turut 2016, 2017, 2018 sebanyak 11,52 juta, 14,2 juta, dan 15,8 juta kunjungan.

"Jadi semestinya ini dikaji, 3 tahun penerapan bebas visa, negara yang diberikan bebas visa apakah benar-benar berkontribusi pada wisman yang datang ke Indonesia atau tidak," ucapnya.

Rudiana berharap pemerintah dapat mencabut hak bebas visa kunjungan kepada negara yang tak memiliki atau hanya sedikit berkontribusi pada kunjungan wisman di Tanah Air.

"Negara yang masyarakatnya tidak aman juga jangan diberikan bebas visa ke Indonesia. Harus selektif. Jangan main buka-buka saja, kalau turisnya *enggak* ada, apa yang mau dibuka," terangnya.

Sekretaris Jenderal Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies Titus Indrajaya menuturkan, evaluasi pemberian bebas visa kepada 169 negara perlu dilakukan untuk melihat negara mana saja yang potensial. Dengan begitu, akan ada strategi untuk menghadirkan wisman dan memperpanjang lama tinggal wisman di Tanah Air.

"Memang, dengan bebas visa ini membuat turis datang ke Indonesia tetapi tak terlalu besar dampaknya. Ini dilihat realisasi jauh di bawah target," ujarnya.

## TAK SEPAKAT

Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia Azril Azahari berpendapat sejak awal dicanangkan, pihaknya tak sependapat dengan kebijakan bebas visa. Pasalnya, turis akan menentukan destinasi pilihannya bukan karena adanya bebas visa atau kemudahan kedatangan melainkan pada destinasi yang akan dikunjunginya terutama pada tingkat daya tarik destinasi itu.

Selain itu, dengan adanya kebijakan bebas visa, kecenderungan turis asing yang berkunjung ke Indonesia adalah dari kalangan menengah ke bawah atau juga *backpacker*. "Ini artinya secara mengejar jumlah kedatangan wisman atau kuantitas saja tetapi secara kualitas apalagi *spending*-nya tidak tercapai," ucapnya.

Bebas visa, lanjutnya, tidak resiprokal yang artinya belum tentu negara tersebut memberikan bebas visa juga pada pemegang paspor Indonesia atau wisnas.

"Evaluasi ini diperlukan segera. Pelaksanaan dan penentuan bebas visa tersebut tentu diawali dengan kajian yang mendalam," kata Azril.

Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny F. Sompie mengatakan program bebas visa berdampak pada penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari *visa on arrival*.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata Guntur Sakti menuturkan, dampak pemberian bebas visa sangat signifikan pada kunjungan wisman. "Kenaikan kunjungan dari masing-masing negara sekitar 13,9% hingga 174%."

Kendati demikian, dia mengakui tak semua negara penerima bebas visa kunjungan ke Indonesia berkontribusi besar pada wisman. Terdapat 49 negara kontribusinya kecil atau kedatangannya ke Indonesia hanya sedikit, alias kurang dari 100 wisman per tahun.

"Sebanyak 49 negara ini diusulkan ke Kemenkumham untuk diubah dari bebas visa kunjungan menjadi *visa on arrival*. Keputusannya ada di Kemenkumham," ucapnya. ■

## BEBAS VISA

Program bebas visa Indonesia diminta untuk dievaluasi, lantaran efektivitasnya dalam menggaet kunjungan wisatawan mancanegara dinilai belum maksimal. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa, Indonesia memberikan akses bebas visa kepada 169 negara.

**Peringkat Kekuatan Paspor Indonesia di Asean Menurut Henley Passport Index 2019:**

| | |
|---|---|
| 1. Singapura | 189 destinasi |
| 2. Malaysia | 177 destinasi |
| 3. Brunei | 165 destinasi |
| 4. Timor Leste | 97 destinasi |
| 5. Thailand | 75 destinasi |
| 6. Indonesia | 70 destinasi |
| 7. Filipina | 67 destinasi |
| 8. Kambodia | 54 destinasi |
| 9. Laos | 52 destinasi |
| 10. Vietnam | 51 destinasi |
| 11. Myanmar | 48 destinasi |

**Paspor 'Terkuat' di Dunia Berdasarkan Akses Bebas Visa:**

| | |
|---|---|
| 1. Jepang, Singapura, dan Korea Selatan | 189 destinasi |
| 13. Malaysia | 177 destinasi |
| 21. Brunei | 165 destinasi |
| 52. Timor Leste | 97 destinasi |
| 59. Papua New Guinea | 83 destinasi |
| 66. Thailand | 75 destinasi |
| 67. China | 74 destinasi |
| 71. Indonesia | 70 destinasi |
| 80. India | 60 destinasi |
| 88. Vietnam | 51 destinasi |

### DAFTAR NEGARA YANG BISA DIKUNJUNGI WISATAWAN ASAL INDONESIA TANPA MENGGUNAKAN VISA:

1. Armenia: eVisa atau Visa on Arrival 120 hari
2. Azerbaijan: eVisa atau Visa on Arrival 30 hari
3. Belarus • Bebas visa 5 hari, dengan syarat harus mendarat di Bandara Internasional Minsk
4. Bolivia • eVisa
5. Brunei • Bebas visa 14 hari
6. Cape Verde • Visa on arrival
7. Chile • Bebas visa 90 hari
8. Comoros • Visa on arrival 45 hari
9. Djibouti • Visa on arrival
10. Dominica • Bebas visa 21 hari
11. Ekuador • Bebas visa 90 hari
12. Fiji • Bebas visa 120 hari
13. Filipina • Bebas visa 30 hari
14. Gabon • eVisa atau Visa on arrival, dengan syarat harus mendarat di Bandara Internasional Libreville
15. Gambia • Bebas visa 90 hari, tapi harus ditambah izin dari Imigrasi Gambia
16. Guinea-Bissau • eVisa atau Visa on arrival 90 hari
17. Guyana • Bebas visa 30 hari
18. Haiti • Bebas visa 90 hari
19. Hong Kong • Bebas visa 30 hari
20. India • eVisa 60 hari yang berlaku di 24 bandara dan 3 pelabuhan
21. Iran • Visa on arrival 30 hari
22. Kamboja • Bebas visa 30 hari
23. Kenya • eVisa atau Visa on arrival 3 bulan
24. Kepulauan Marshall • Visa on arrival 90 hari
25. Kolombia • Bebas visa 90 hari, tapi bisa diperpanjang jadi 180 hari
26. Kyrgystan • eVisa atau visa on arrival 1 bulan, tapi dengan mendarat di Bandara Internasional Manas
27. Laos • Bebas visa 30 hari
28. Macau • Bebas visa 30 hari
29. Madagaskar • Visa on arrival gratis 30 hari
30. Malawi • Visa on arrival 30 hari yang bisa diperpanjang jadi 90 hari
31. Malaysia • Bebas visa 30 hari
32. Maldives/Maladewa • Visa on arrival gratis 30 hari
33. Mali • Bebas visa 30 hari
34. Mauritania • Visa on arrival di Bandara Internasional Nouakchott-Oumtounsy
35. Mauritius • Visa on arrival 60 hari
36. Micronesia • Bebas visa 30 hari
37. Maroko • Bebas visa 90 hari
38. Mozambique • Visa on arrival 30 hari
39. Myanmar • Bebas visa 14 hari
40. Nepal • Visa on arrival 90 hari
41. Nikaragua • Visa on arrival 90 hari
42. Oman • eVisa atau Visa on arrival 30 hari
43. Palau • Visa on arrival 30 hari
44. Palestina • Bebas visa tanpa keterangan waktu
45. Pantai Gading • eVisa, dengan syarat harus mendarat di Bandara Port Bouet
46. Papua Nugini • Visa on arrival gratis 60 hari, tapi dikenai biaya untuk perpanjangannya
47. Peru • Bebas visa 183 hari
48. Qatar • Bebas visa 30 hari, masuk dari Bandara Internasional Hamad
49. Rwanda • Bebas visa 90 hari
50. Samoa • Entry permit 60 hari
51. Serbia • Bebas visa 30 hari, dalam 1 tahun berjalan
52. Seychelles • Visitor's Permit gratis 3 bulan
53. Singapura • Bebas visa 30 hari
54. Somalia • Visa on arrival 30 hari di tiga bandara. Yakni, Bandara Bosaso, Galcaio, dan Mogadishu
55. Srilanka • eVisa atau Visa on arrival 30 hari
56. St Vincent and the Grenadines • Bebas visa 30 hari
57. Suriname • Tourist Card 90 hari
58. Tajikistan • Visa on arrival 45 hari
59. Tanzania • Visa on arrival
60. Thailand • Bebas visa 30 hari, khusus yang menempuh jalan darat maksimal berlaku untuk dua kali kunjungan dalam setahun
61. Timor Leste • Visa on arrival 30 hari
62. Togo • Visa on arrival 7 hari
63. Turki • eVisa atau Visa on arrival 30 hari
64. Tuvalu • Visa on arrival 30 hari
65. Uganda • eVisa atau Visa on arrival
66. Ukraina • Visa on arrival 15 hari
67. Uzbekistan • Bebas visa 30 hari
68. Vietnam • Bebas visa 30 hari
69. Yordania • Visa on arrival 90 hari
70. Zimbabwe • eVisa atau Visa on arrival 90 hari

Sumber: BPS, Bank Indonesia dan Henley Passport Index, 2019 — Bisnis/Erlangga Adiputra

| Judul | **Penempatan Lokasi Segera Ditetapkan** | Tanggal | 14 Juni 2019 |
|---|---|---|---|
| Media | Bisnis Indonesia (Hal. 19) | | |
| Resume | Untuk pembangunan Tol Bengkulu – Lubuk Linggau | | |

▸ JALAN TOL BENGKULU–LUBUK LINGGAU

# Penetapan Lokasi Segera Disahkan

**Bisnis, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Bengkulu diperkirakan menerbitkan surat penetapan lokasi untuk proyek jalan tol Bengkulu—Lubuk Linggau pada pekan depan.**

*Krisia P. Kinanti*
*krisia.puti@bisnis.com*

- **Surat penetapan lokasi proyek jalan tol Bengkulu–Lubuk Linggau akan dikeluarkan oleh Gubernur Bengkulu pekan depan.**
- **Kementerian PUPR menargetkan jalan nasional di lintas pantai selatan Jawa tersambung seluruhnya pada 2024.**

Manajer Proyek PT Hutama Karya (Persero) Hasan Turcahyo menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan rapat terkait dengan persiapan pembebasan lahan jalan tol tersebut.

"Saya sedang di Bengkulu rapat dengan Gubernur Bengkulu membahas persiapan pembebasan ruas tol Bengkulu—Lubuklinggau," tuturnya kepada *Bisnis*, Kamis (13/6).

Menurut Hasan, surat penetapan lokasi (penlok) akan dikeluarkan oleh Gubernur pada pekan depan, selanjutnya akan dilakukan pembangunan jalan tol Bengkulu—Lubuk Linggau trase pertama. "Penlok akan terbit senin 17 Juni nanti."

Pada Maret lalu, PT Hutama Karya (Persero) menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) ruas Bengkulu—Lubuk Linggau dengan Badan Pengatur Jalan Tol.

Ketika itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa dengan ditandatanganinya PPJT diharapkan agar proses pembangunan jalan tol sepanjang 95,80 kilometer itu segera dimulai.

"Jalan tol ini sangat berpengaruh, Bengkulu menjadi daerah yang agak terisolir, dengan investasi tol Rp33,13 triliun akan bisa mengangkat perekonomian," ujarnya.

Pembangunan ruas tol Bengkulu—Lubuk Linggau terbagi menjadi tiga seksi yakni Taba Penanjung—Bengkulu sepanjang 17,60 km, Kepahiang—Taba Penanjung sepanjang 23,70 km, dan Lubuk Linggau—Kepahiang sepanjang 54,50 km.

PT Hutama Karya juga merencanakan pembangunan terowongan di ruas Bengkulu—Lubuk Linggau pada 2021. Terowongan ini akan menjadi salah satu yang terpanjang di Indonesia.

Terowongan akan dibangun kembar sepanjang 7 km. Biaya pembangunan terowongan diestimasi sebesar Rp500 miliar per kilometer sehingga untuk 7 km membutuhkan biaya Rp3,5 triliun.

Hingga Maret 2019, Hutama Karya tengah membangun 529 km jalan tol Trans-Sumatra dengan 47 km di antaranya sudah beroperasi penuh.

Beberapa ruas yang tengah dibangun adalah jalan tol Terbanggi Besar—Pematang Panggang—Kayu Agung 189 km, ruas Padang—Sicincin (bagian dari jalan tol Padang—Pekanbaru) 31 km, Pekanbaru—Dumai 131 km, Kualatanjung—Tebing Tinggi—Parapat 98 km, Medan—Binjai (Helvetia sampai junction Tanjung Mulia) 6 km, serta ruas Banda Aceh—Sigli 74 km.

Adapun, ruas yang sudah beroperasi penuh selain Bakauheni—Terbanggi Besar, adalah ruas Palembang—Indralaya 22 km dan Medan-Binjai seksi Binjai—Semayang dan seksi Semayang—Helvetia sepanjang 11 km.

## PANSELA JAWA

Pada kesempatan berbeda, Kementerian PUPR menargetkan jalan nasional di lintas pantai selatan atau pansela Jawa bisa tersambung seluruhnya pada 2024. Kecepatan pembangunan jalan yang belum tembus bakal bergantung pada proses pembebasan lahan.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto mengatakan bahwa saat ini jalan lintas pansela belum tembus di enam kabupaten di Jawa Timur, membentang dari Trenggalek hingga Banyuwangi.

Adapun, jalan yang sudah dibangun di lintas pansela terbentang dari Lebak (Banten) hingga Pacitan (Jawa Timur). "Kami berharap 2024 itu nanti bisa selesai. Kami terus bangun secara bertahap kalau tanahnya sudah bebas. Jadi, kalau tanah sudah bebas, mau dikerjakan lembur juga kami siap," ujarnya kepada *Bisnis*, Rabu (12/6).

Secara keseluruhan, panjang jalan lintas pansela mencapai 1.405 km. Sebagian besar jalan yang belum tembus berada di tujuh kabupaten di Jawa Timur.

Oleh karena itu, Kementerian PUPR berupaya membangun jalan lintas di tujuh kabupaten dengan panjang 220 km. Anggaran untuk pembangunan jalan lintas Pansela dialokasikan sekitar Rp300 miliar—Rp400 miliar.

Pemerintah berupaya meningkatkan konektivitas di pansela Jawa guna mengurangi kesenjangan dengan pantai utara (pantura).

Selain membangun jalan baru, Kementerian PUPR juga terus merawat kondisi jalan agar bisa digunakan dengan aman dan nyaman. Sebelumnya, Kementerian PUPR memperhatikan desain geometri karena kontur yang dilahui berliku dan curam.

Jalan lintas pansela juga akan berfungsi sebagai jalur alternatif pada masa angkutan Lebaran.

Sugiyartanto berharap agar keberadaan jalan lintas pansela bisa menunjang pariwisata di lintas selatan yang memiliki destinasi unggulan. Untuk itu, keunggulan pariwisata di lintas Selatan juga perlu terus dipromosikan.

Pada perkembangan lain, Ditjen Bina Marga diusulkan mendapat tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun pada 2020 dari total pagu indikatif Rp38,84 triliun.

Tambahan ini diperlukan untuk menuntaskan pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur sebesar Rp2,20 triliun. Selain itu, anggaran perlu ditambah Rp1,30 triliun untuk meningkatkan kemantapan jalan nasional.

Pemeliharaan jalan nasional diusulkan bertambah dari 45.349 km menjadi 47.017 km atau bertambah 1.668 km.

Sugiyartanto mengatakan, Ditjen Bina Marga juga mengusulkan revitalisasi trotoar dan drainase pada jalan nasional di kota besar dan membangun jembatan gantung. Alokasi anggaran untuk dua program ini masing-masing Rp300 miliar. *(Rivki Maulana)*

| Judul | **Berita Foto** | Tanggal | 14 Juni 2019 |
|---|---|---|---|
| Media | Bisnis Indonesia (Hal. 19) | | |
| Resume | Suasana pembangunan TOD di stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Kamis (13/6) | | |

## HUNIAN TERINTEGRASI

Antara/Aditya Pradana Putra

**Suasana pembangunan** rumah susun terintegrasi dengan sarana transportasi atau *transit oriented development* (TOD) di samping Stasiun Kereta Api Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Kamis (13/6). Pembangunan hunian TOD Tanjung Barat hasil kerja sama PT Kereta Api Indonesia dan Perum Perumnas tersebut diharapkan dapat menjadi solusi penyediaan perumahan sekaligus upaya mengurangi kemacetan di Jakarta.

| Judul | **HK & Berantas Bakal Bangun Bulango Ulu** | Tanggal | 14 Juni 2019 |
|---|---|---|---|
| Media | Bisnis Indonesia (Hal. 19) | | |
| Resume | Saat ini masuk lelang bendungan yang akan berlokasi di Gorontalo | | |

▶ LELANG BENDUNGAN

# HK & Berantas Bakal Bangun Bulango Ulu

Bisnis, JAKARTA — Dua badan usaha milik negara, PT Hutama Karya (Persero) dan PT Brantas Abipraya (Persero) memenangi lelang pembangunan Bendungan Bulango Ulu, Gorontalo senilai Rp2,36 triliun.

Pengumuman pemenang ini menjadi tahap akhir dari proses lelang yang sudah memakan waktu 9 bulan.

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, Hutama Karya memenangi lelang pada paket pertama dengan nilai penawaran sebesar Rp1,27 triliun. Hutama Karya menyisihkan 131 peserta yang ikut dalam lelang tersebut.

Sementara itu, Brantas Abipraya memenangi lelang paket kedua dengan nilai penawaran Rp1,04 triliun. Brantas Abipraya mengungguli 129 peserta yang berpartisipsai dalam proses pelelangan.

Pembangunan Bendungan Bulango Ulu akan menggunakan dana APBN dengan skema tahun jamak.

Data Pusat Bendungan Kementerian PUPR menunjukkan bahwa Bendungan Bulango Ulu memiliki daya tampung sebesar 116,89 juta meter kubik dengan luas genangan 110,9 hektare.

Air yang ditampung di bendungan ini diproyeksi bisa menjadi sumber irigasi untuk 4.193 hektare lahan pertanian dan air baku 1,15 meter kubik per detik.

Kepala Pusat Bendungan Kementerian PUPR Ni Made Sumiarsih mengatakan bahwa penandatanganan kontrak akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Ada beberapa bendungan lagi yang akan dilelang," ujarnya kepada *Bisnis*, Kamis (13/6).

Berdasarkan jadwal yang dilansir dari LPSE, proses pelelangan pembangunan Bendungan Bulango Ulu masih dalam masa sanggah.

Hutama Karya dan Brantas Abipraya baru akan ditetapkan sebagai pemenang lelang bila panitia menolak sanggahan peserta lain pada 21 Juni 2019. Dua hari berselang, penandatanganan kontrak dijadwalkan berlangsung.

Berdasarkan catatan *Bisnis*, proses pelelangan Bendungan Bulango Ulu sudah dimulai pada 31 Oktober 2018.

Dengan kata lain, perlu 9 bulan bagi panitia untuk menuntaskan tahap demi tahap hingga masa pengumuman pemenang.

Proyek bendungan yang terletak di Kabupaten Bone Bulango ini juga menjadi yang proyek terakhir dilelang pada 2018.

Hingga 31 Desember 2018, Kementerian PUPR telah menandatangani kontrak pembangunan 14 bendungan senilai Rp22,19 triliun. **(Rivki Maulana)**

| Judul | **Bank Dunia Beri Pinjaman Utang Rp 707,69 Miliar** | Tanggal | 14 Juni 2019 |
|---|---|---|---|
| Media | Koran Tempo (Hal. 6) | | |
| Resume | Untuk pembangunan jalan layang tol di kawasan Kali Malang, Jakarta Timur, | | |

# Bank Dunia Beri Pinjaman Utang Rp 707,69 Miliar

TEMPO/TONY HARTAWAN

**Proyek jalan layang tol di kawasan Kali Malang, Jakarta Timur, 21 Januari 2019.**

**JAKARTA** — Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman senilai US$ 49,6 juta atau sekitar Rp 707,69 miliar untuk pembiayaan proyek perkotaan di Indonesia. Dana itu dikhususkan untuk meningkatkan kapasitas berbagai kota dan menganalisis investasi infrastruktur guna mencapai pengembangan daerah perkotaan berkelanjutan.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Rodrigo A. Chaves, mengatakan dana akan disalurkan ke berbagai instansi terkait dengan perkotaan agar memperbaiki kapasitas dalam manajemen keuangan dan perencanaan perkotaan serta integrasi yang lebih baik antara perencanaan pembangunan sosio-ekonomi dan spasial.

"Proyek ini akan menjadikan pembiayaan infrastruktur lebih efektif agar kota menjadi lebih layak untuk ditinggali dan produktif," ujar Chaves dalam keterangan resmi Bank Dunia, kemarin. Dengan begitu, diharapkan manajemen kota dan perencanaan bisa terintegrasi lebih baik. Seperti diketahui, Indonesia selama ini dinilai menjadi salah satu negara kontributor terbesar urbanisasi di dunia.

Chaves mengatakan Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim yang merugikan. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), populasi perkotaan Indonesia terus melonjak hingga menyentuh hampir 59 juta dari 2010 hingga 2018. Saat ini, 137 juta orang tinggal di kota-kota di Indonesia atau 54 persen dari populasi yang ada. Angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi 68 persen dari populasi pada 2025.

● ANDI IBNU